

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR ALJAZAIR DAN KETERLIBATANNYA DALAM KONFLIK MAROKO-SAHARA BARAT

Konflik Sahara Barat yang terjadi antara Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi menjadi persoalan yang menyita perhatian internasional, karena konflik sengketa tersebut melibatkan banyak peran negara lainnya untuk kepentingan mereka masing-masing seperti Aljazair yang mendukung Front Polisario memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat, serta Amerika Serikat (AS) maupun Prancis yang lebih pro terhadap Maroko. Konflik ini semakin meruncing karena melibatkan negara muslim di Aljazair. Disamping itu juga sedikit-banyak menghambat kemajuan negara-negara di Afrika Utara (kawasan Maghribi). Padahal Sahara Barat juga masih diakui oleh masyarakat internasional sebagai “pemerintahan sendiri” yang tidak diduduki oleh pemerintahan dari negara lain.

A. Babak Baru Perseteruan Aljazair-Maroko

Maroko menegaskan bahwa konflik ini adalah pemberontakan rakyat sipil dan bukan menjadi sengketa wilayah. Pernyataan ini cukup susah untuk dipahami karena faktanya kasus ini adalah sebuah perebutan sengketa kekuasaan wilayah. Contoh kasus ketika pada tahun 2001 Presiden Polisario Mohammed Abdelaziz mengirim Raja Mohammed VI (Raja Maroko) undangan untuk mengatur negosiasi, Raja

Muhammed VI hanya membalas bahwa Abdelaziz dipersilahkan datang ke Rabat sebagai seseorang yang diberi kesempatan untuk memberi penghormatan kepada raja.¹ Meninjau dari sikap konsisten Maroko sejak Sahara Barat diberikan oleh Spanyol, mengungkapkan bahwa tujuan Rabat adalah untuk mendapatkan kedaulatan dan pengakuan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para negara-negara arbitrase lainnya.

Ada upaya dari beberapa pemerintah Maghrebi menyerukan penyatuan politik dan ekonomi. Di tahun 1995 Aljazair menjadi ujung tombak proses integrasi ketika Maroko ditangguhkan partisipasinya dalam Arab Maghreb Union (UMA).² Kemudian, tepat sebelum KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) UMA pada tahun 1999, Raja Hassan II mengisyaratkan kesiapan nyatanya untuk meningkatkan komunikasi dan terlibat dalam pembicaraan dengan Presiden Aljazair, Bouteflika. Tapi Raja Hassan II meninggal tiba-tiba pada tanggal 24 Juli sebelum pertemuan diadakan.³

Tahun berikutnya, kepala negara dari Aljazair, Libya, Maroko dan Tunisia mengadakan KTT untuk memulai kesadaran dari para anggota UMA, bahwa partisipasi dalam ekonomi global menjadi semakin sulit jika hanya berdiri sendiri-sendiri.⁴ Mereka dijadwalkan mengadakan pertemuan puncak UMA untuk tahun 2002 tapi Raja Mohammed mundur pada menit terakhir. Meskipun Aljazair dan

¹ "Polisario's Sinking Hopes: Promises, promises, never kept." *The Economist*. 361: 8251. (Dec. 8, 2001)1

² Yahia H. Zoubir, "The Resurgence of Algeria's Foreign Policy in the Twenty-First Century." *The Journal of North African Studies*. 9, 2 (2004) 171

³ *Ibid*, Zoubir (2004) 171

⁴ *Ibid*, Zoubir (2004) 172

Maroko keduanya mengungkapkan keinginan untuk kerjasama yang lebih besar, isu Sahara Barat terus menghambat peluang dalam kedamaian yang lebih nyata.

Prancis berhati-hati untuk tidak membiarkan hubungan khususnya dengan Maroko mengganggu hubungan yang rumit dan kompleksnya antara Maroko dengan Aljazair. Hubungan Perancis-Aljazair sempat menjadi tidak harmonis sampai awal tahun 2000-an, tetapi Aljazair pada abad ke-21 telah menjadi kekuatan dalam kerjasama kebijakan ekonomi dan keamanan di kawasan Mediterranean.⁵ Meskipun pengaruh di daerah ini meningkat, Aljazair masih tidak dapat menegosiasikan dukungan Eropa untuk menghindari referendum panjang pada Rakyat Sahrawi.

1. Persaingan di Kancah Politik

Maroko dan Aljazair memiliki kondisi hubungan yang relatif stabil dengan adanya pemerintahan yang terpusat, badan intelijen elit dan militer yang kuat. Namun kuatnya perselisihan dalam perebutan wilayah Sahara Barat membuat kedua negara selalu berada dalam kondisi dilema yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan sebuah persaingan antar negara yang dapat dilihat dari kondisi politik, ekonomi dan juga kondisi sosial mereka. Setelah Maroko dan Aljazair merdeka dari Perancis dan Spanyol, mereka memiliki sudut kepentingan dan orientasi yang berbeda dalam menyebarkan paham pengaruhnya, Maroko lebih condong kebarat, sedangkan Aljazair sebaliknya, ke blok timur.

⁵ Yahia H. Zoubir "The Resurgence of Algeria's Foreign Policy in the Twenty-First Century." *The Journal of North African Studies*. 9: 2 (2004) 174-6

Tindakan Aljazair pada tahun 2010 menentang kerjasama “*counterterror*” Mauritania dengan Perancis, dimana saat itu Mauritania sedang menjalin hubungan baik dengan Maroko dibawah Presiden Mohamed Abdel Azis. Selanjutnya Aljazair berusaha untuk membangun kembali sentralitas dengan mengadakan pertemuan multilateral dibagian selatan kota Tamanrasset. Dalam pertemuan tersebut juga membahas koordinasi keamanan di Niger, Mauritania dan partisipasi Mali dalam “Joint Operational Chiefs of Staff Committee (CEMOC in French).” Namun dalam pertemuan tersebut Maroko tidak diundang oleh Aljazair. Langkah ini merupakan upaya yang jelas untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap Aljazair dibagian selatan yang telah lama bertikai. Selain itu, ditahun yang sama pula Aljazair menolak untuk berpartisipasi dalam pertemuan dengan para ahli G8 di Mali setelah Maroko diundang.⁶

Pada tahun 2012 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton mengunjungi Aljazair dalam rangka menggalang kekuatan bersama juga dengan Perancis untuk menghadapi militan ekstrimis dari Mali. Namun Maroko merasa direndahkan karena dirinya tidak diikut sertakan dalam masalah ini. Selain itu Maroko merasa khawatir jika posisi Aljazair semakin tumbuh sebagai kekuatan baru di daerah konflik utama, wilayah Sahel. Ketidakstabilan politik telah menjangkiti beberapa negara-negara di wilayah Sahel selama bertahun-tahun. Di Mali, kudeta militer pada bulan Maret 2012 membuat *territory* ini akhirnya menjadi lebih stabil dalam demokrasi yang telah berlangsung selama 20 tahun. Selanjutnya, ekstrimis

⁶ <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/kerrys-visit-to-morocco-and-algeria-navigating-between-competitors> diakses pada 12-5-2016 jam 1.12 am

yang telah menduduki sebagian besar wilayah utara mulai menuju selatan, berniat mengambil kendali dari seluruh negeri. Pada Januari 2013 intervensi yang dipimpin oleh Perancis dan Chad menggagalkan rencana mereka.⁷ Aljazair berpendirian dengan kuat terkait pengambilan keputusan sepihak dalam kebijakan regional, hanya sedikit mempertimbangkan masalah regional dengan anggota maghribi dan sekitarnya. Dan selalu mencari cara dalam memposisikan negaranya sebagai aktor sentral dalam perang regional melawan teror dan mengesampingkan peran negara-negara di sekitar Sahel *territory* serta menolak keikutsertaan Rabat.⁸

Kebijakan-kebijakan luar negeri dari Aljazair yang dapat dianggap sebagai keegoisan (dalam perspektif Maroko), negara ini dapat memicu timbulnya ketegangan yang cukup signifikan dengan Maroko sebagai rivalnya. Kebijakan Aljazair ini pun juga semakin mempunyai posisi tawar politik yang kuat, dan dapat menjadi pelopor atau membuat kebijakan-kebijakan yang lebih memihak kepada negerinya. Terutama jika posisi tawar politik ini digunakan untuk mendapatkan wilayah Sahara Barat yang selama ini disengketakan dan mendukung atas referendum, maka dapat disimpulkan Aljazair menjadi salah satu aktor politik negara yang mempunyai kekuatan politik cukup kuat dalam mempengaruhi *the decisions maker in Maghrib and Africa*.

Jika Maroko telah berhasil dalam mengubah pandangan negara Maghribi, Afrika bahkan internasional atas Sahara Barat atau Polisario, maka akan dianggap

⁷ <http://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2013/sahel-one-region-many-crises> diakses pada 12-5-2016 jam 12.56 am

⁸ *Ibid*, <http://www.washingtoninstitute.org>

sebagai melemahnya posisi Aljazair. Namun, jika Aljazair mampu mempertahankan sikap sebelumnya pada Sahara Barat atau telah sukses dalam membatasi klaim Maroko di wilayah, baik melalui tindakan langsung atau dukungan negara lain, maka akan dipandang sebagai memperkuat posisi Aljazair.

2. Ketetapan Pilihan Aljazair

Aljazair adalah negara yang mendukung gerakan Front Polisario. Namun, dukungan Aljazair terhadap Polisario dan Sahrawi tidak terbatas pada dukungan politik dan kerjasama saja, mereka membiarkan pengungsi dari Sahara Barat untuk menetap dalam perbatasan mereka. Aljazair juga sudah memberikan pendidikan, pelatihan militer serta bantuan ekonomi kepada orang-orang Sahara.

Selain itu, “Aljazair juga memberikan bantuan militer, diplomatik dan logistik kepada Polisario dan SADR (Zoubir, 1998: 150), termasuk penjualan senjata buatan Soviet (Hodges, 1983; Thompson & Adloff, 1980).⁹ Pemerintah Aljazair adalah sebagai pendukung tunggal di daerah Sahara Barat, (Pennel, 2000: 343),¹⁰ oleh karena itu ada keuntungan besar yang akan dibuat oleh Aljazair melalui monopoli ini.

Pada akhirnya, “Aljazair memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak semua orang di wilayahnya”, kata *Human Rights Watch*. Sehingga Aljazair harus terbuka mengakui tanggung jawab hukum untuk menjamin

⁹ Humphrey Susan, The Western Sahara dalam <http://atlismta.org/online-journals/0809-journal-intervention/the-western-sahara-conflict/>

¹⁰ Ibid

penghormatan terhadap hak-hak semua orang di wilayahnya, termasuk warga kamp pengungsi Polisario yang lari. Para pengungsi juga harus menikmati hak-hak mereka untuk mendapatkan dan memiliki paspor Aljazair atau dokumen perjalanan pengungsi dan digunakan tanpa hambatan untuk keluar dan memasuki wilayah Aljazair.

Namun, faktanya beberapa pengungsi menghadapi kesulitan saat ingin bepergian dari Aljazair keluar dari Tindouf dan pemerintah Aljazair menginginkan pengungsi Sahrawi mendapatkan izin jika berwisata ke luar Tindouf, sehingga untuk sementara waktu pemerintah Aljazair menyita paspor yang dipegang oleh pengungsi Sahrawi pada saat kedatangan mereka memasuki wilayah Aljazair. Sebelum meninggalkan kamp-kamp, para pemudik harus melalui beberapa pos pemeriksaan, beberapa dijaga oleh pasukan keamanan Polisario dan tentara Aljazair.

Aljazair ingin memiliki akses ke wilayah pesisir Atlantik sehingga memanipulasi minoritas Sahrawi untuk mencapai tujuannya. Aljazair telah melatih orang Maroko yang menjadi anggota Front Polisario ketika membebaskan Sahara Barat dari tangan Spanyol. Kepentingan Aljazair tentu saja untuk mencari celah memasuki wilayah Atlantik.

Menurut analisis politik Spanyol, "Aljazair telah menghabiskan hampir 60 juta dolar dalam hal peralatan, bantuan militer, dan membeli suara dari negara-negara anggota mantan OAU, negara Amerika Selatan dan bahkan di kamp-kamp Tindouf dan negara maghreban ini diatur oleh "keturunan pembelot militer dari Tentara

Perancis".¹¹ Selain itu, berdasarkan perkiraan para ahli Aljazair, "Aljazair telah menghamburkan sejumlah ratusan juta dollar yang digunakan untuk mendanai proyek untuk memisahkan Maroko dari perusahaan Sahara".¹²

Pada bulan Maret 2010, Abdelkader Messahel seorang Menteri Aljazair untuk urusan Maghreb dan Afrika, menyatakan bahwa "Saya telah menelusuri dan meneliti beberapa buku-buku geografi dan perbatasan bahwawsanya saya telah menemukan adanya indikasi bahwa maroko tidak memiliki perbatasan dengan jalur Sahel", dia hanya menegaskan kembali keyakinan yang telah ada sejak lama pada Aljazair bahwa Aljazair memiliki kedudukan atas Sahara dan Sahel.

Pernyataan menteri ini juga berisi tentang dua pengingat yang secara emplitis merupakan asumsi utama Aljazair, yaitu:

1. Sahara Barat adalah bukan dan tidak akan pernah menjadi bagian dari wilayah Maroko.
2. Kemanan di Sahel merupakan hak prerogatif Aljazair, tidak seperti Maroko yang memiliki batas dengan Sahara di sepanjang Sahel.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Sahara merupakan aset bagi kekuatan Aljazair. Sejak kemerdekaan Aljazair pada tanggal 5 Juli 1962, posisi Aljazair di wilayah Sahara Barat berubah secara fundamental. Dalam proses pencapaian keutuhan

¹¹ <http://www.sahara-developpement.com/Western-Sahara/The-%C2%AB-Polisario-%C2%BB-is-an-Algerian-invention-to-divert-the-attention-of-its-internal-problems--Spanish-expert--91-483-5494.aspx>

¹² Haidar Ali, Algeria's Bias Laid Bare in Geneva dalam <http://sahara-news.org/964-western-sahara-algerias-bias-laid-bare-in-geneva.html>

wilayah dan membangun persatuan nasional di Aljazair, tujuan utama Aljazair adalah mengintegrasikan Sahara ke dalam bangsa yang baru.

Setelah sekian lama Aljazair mendukung Front Polisario, akhirnya pada Agustus 2012, Aljazair merasakan suasana yang tidak nyaman. Sebenarnya, Aljazair telah berulang kali diperingatkan oleh intelijen Barat bahwa kamp-kamp pengungsi di Tindouf itu menjadi tempat yang aman dan tempat transit bagi teroris dan penyelundup lainnya dari semua jenis. Keadaan semakin buruk bagi Aljazair ketika pemerintah Spanyol tiba-tiba memutuskan untuk memulangkan relawan kemanusiaan Spanyol dari kamp Tindouf. Para diplomat Spanyol mengatakan bahwa keputusan tersebut disebabkan oleh ketidakamanan yang berlaku di seluruh wilayah dan ketakutan untuk melihat lebih banyak warga Spanyol yang diculik, setelah penculikan tiga pekerja bantuan di kamp-kamp Tindouf pada Oktober 2011. Spanyol harus menyerahkan tebusan sejumlah €15.000.000 untuk dapat membebaskan tiga sandera, dua orang Spanyol, Ainhoa Fernandez dan Enric Gonyalons, dan satu nasional Italia, Rossella uRRu.¹³

Dengan strategi mengalihkan kecurigaan di depan Front Polisario dan para pemimpinnya, pemerintah Aljazair mulai melakukan perbaikan dalam internal aparat militer dan keamanan di kamp-kamp Tindouf. Para milisi Polisario dibebaskan dari tugas militer & keamanan juga mereka mempercayakan jasa militer & keamanan Aljazair dengan mendirikan pos-pos pemeriksaan di sekitar kamp-kamp pengungsi.

¹³ Khaled Ibrahim Khalid, Algeria's Uneasiness Worsened by Polisario's Gaffes dalam <http://polisario-confidential.org/377-algerias-uneasiness-worsened-by-polisarios-gaffes.html> pada tanggal 6 Agustus 2012

Langkah pemerintah Aljazair ini dimaksudkan untuk memblokir jalan menuju para pedagang yang transit melalui zona ini dan juga untuk mencegah para pengungsi Sahrawi melarikan diri dari kamp Tindouf ke Mali Utara untuk bergabung dengan pejuang Al-Qaeda di maghreb Islam (AQIM).

Pada tanggal 22 Januari 2014, seluruh provinsi Tindouf ditetapkan sebagai Taman Budaya Nasional, hal ini dijelaskan oleh pihak berwenang Aljazair dikarenakan mengingat kurangnya budaya dalam hamparan padang seluas 168.000 km², seseorang hanya bisa berasumsi sebagai dalih untuk menutupi kegiatan militer di kawasan itu atau membuat akses ke dan dari kamp lebih sulit.¹⁴

Posisi terakhir Aljazair, tetap pada pendiriannya agar diberikan opsi penentuan nasib sendiri (*self-determination*) kepada Sahara Barat. Namun, apabila opsi penentuan nasib sendiri tidak diupayakan oleh Maroko, maka Aljazair bersedia membantu PBB serta Sekjen PBB dalam mencari solusi yang bersifat permanen, yaitu *self-determination*. Posisi ini juga disampaikan oleh perwakilan Aljazair di Pretoria yang ditujukan kepada seluruh perwakilan asing lainnya serta organisasi internasional yang berada di Pretoria yang isinya merupakan penyampaian pernyataan Kementerian Luar Negeri Aljazair mengenai sikapnya.¹⁵

Bahkan, pada Oktober 2014 ini Aljazair menyambut dengan senang dan puas atas keputusan PBB dalam memberikan pembebasan kolonisasi di Sahara Barat.

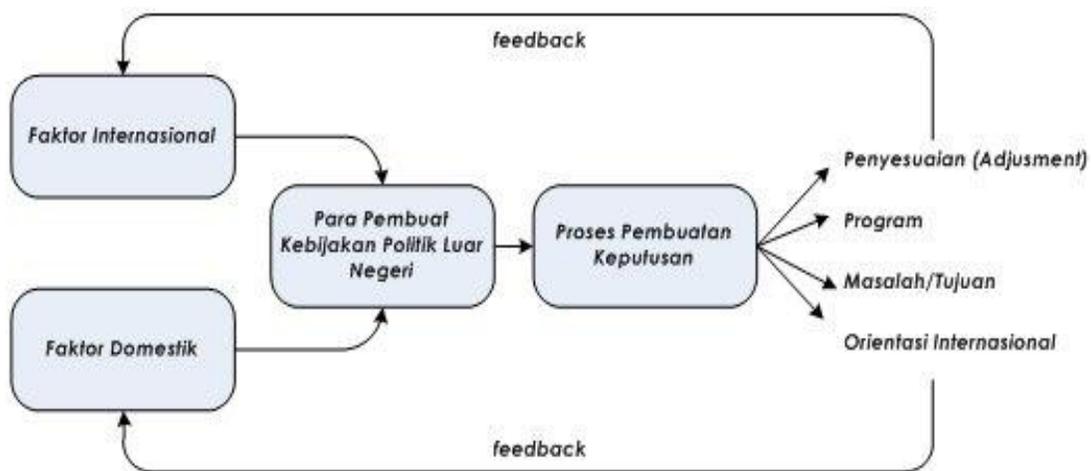
¹⁴ Keenan Jeremy, Algeria Shirks Rights Spotlight in Western Sahara dalam <http://www.middleeasteye.net/columns/algeria-shirks-rights-spotlight-western-sahara-257410627>

¹⁵ Ruslan Rosdiana.2010.Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Sahara Barat (2005-2007). Hal 38dalam Vide Brafaks KBRI Pretoria EE-023/PRETORIA/111/07

Sebagai negara pendukung Front polisario serta negara tetangga dari Sahara Barat, Aljazair juga menjadi pengamat dalam proses penyelesaian konflik Sahara Barat. Untuk itu, Aljazair akan terus berkontribusi terhadap proses dekolonisasi Sahara Barat dan akan memperbaharui dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan utusan pribadinya dalam mencari solusi berdasarkan kebebasan saharawis mengenai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Aljazair menyerukan agar kedua belah pihak yang terkait konflik, yaitu Maroko dan Front Polisario untuk melanjutkan upaya penyelesaian konflik dibawah pengawasan PBB melalui negoisasi langsung tanpa syarat dan solusi politik tentang konflik saling diterima untuk kepentingan Maroko, Saharawis dan populasi Maghreb, hal ini disampaikan oleh pejabat Kementerian.

B. Uni Afrika dan Kebijakan Luar Negeri Aljazair



Gambar 1.3 Skema Politik Luar Negeri oleh K.J Holsti

Seperti skema diatas, penulis memakai teorinya K.J. Holsti. Terdapat dua faktor yang mengawalinya. Yaitu faktor internasional dan domestik. Dalam faktor internasionalnya yaitu penganeksasian wilayah Sahara Barat oleh Maroko dan menjadi sebuah kolonisasi yang tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena referendum merupakan jalan terbaik satu-satunya dalam penentuan nasib sendiri. Faktor domestiknya yaitu kebijakan damai Aljazair dalam menghentikan segala bentuk pemberontakan dan membentuk berbagai aksi damai internasional di kancah politik khususnya wilayah Afrika dan Afrika Utara. Kemudian dirumuskan menjadi sebuah atau beberapa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh dewan Aljazair sehingga lahirlah beberapa putusan terkait sengketa Sahara Barat.

Untuk menjelaskan pergeseran kebijakan luar negeri Aljazair, penulis juga mengambil Pendekatan Peran¹⁶ untuk menunjukkan konsep yang berbeda dari peran nasional kebijakan Aljazair yang diadopsi pada waktu berbeda. Sejak awal 2000-an, peran Aljazair terutama dalam peran tersebut adalah sebagai pemimpin dalam wilayah utama dan anti teroris.¹⁷ Peran seperti itu dimaksudkan untuk melayani kepentingan

¹⁶ According to Holsti, "a national role conception includes the policy-makers' own definitions of the general kinds of decisions, commitments, rules, and actions suitable to their state, and of the functions, if any, their state should perform on a continuing basis in the international system or in subordinate regional systems," K.J. Holsti: "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy," in Stephen G. Walker (ed.), *Role Theory and Foreign Policy Analysis* (Durham NC: Duke University Press, 1987), p. 12. See also Sofiane Sekhri, "The Role Approach as a Theoretical Framework for the Analysis of Foreign Policy in Third World Countries," *African Journal of Political Science and International Relations*, 3, 10 (October 2009):423–32; Lisbeth Aggestam, "Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy". Department of Political Science: University of Stockholm. ARENA Working Papers, 1999, available at: http://www.arena.uio.no/publications/wp99_8.htm

¹⁷ Algerians feel their experience in fighting and defeating domestic terrorism enables them to legitimately claim expertise in the field and to share it with other nations willing to cooperate regionally and internationally.

nasional negara dan tujuan yang telah ditetapkan dan dengan harapan mendapatkan pengaruh dari lembaga-lembaga regional dan internasional.

Ketika tujuan inti seperti ini tidak dicapai (misalnya, kegagalan untuk membangun New International Economic Order (NIEO) atau mengurangi ketergantungan pada kapitalis), Aljazair berjuang untuk meningkatkan betapa penting negaranya sebagai kekuatan pendorong melawan terorisme internasional sehingga dapat memperoleh dukungan di antara negara-negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Analisis kebijakan Aljazair terhadap sub-Sahara Afrika menunjukkan hal itu digunakan OAU untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan orang-orang dari seluruh benua.

Dengan menjadikan Aljazair sebagai pemimpin OAU maka menjadi pilihan rasional yang sangat besar bagi Sahara Barat untuk memerdekakan dirinya dan membuat Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) menjadi bagian yang utuh dan tanpa ditunggangi oleh negara lain dalam melaksanakan pemerintahannya.

C. Kebijakan Luar Negeri Aljazair dan Dinamika Geopolitikanya di Afrika dan Sahara Barat

Selain hubungan dengan Maghreb dan dunia Arab, Aljazair mempunyai hubungan dengan negara-negara Afrika sub-Sahara dan OAU yang merupakan salah satu pilar dari kebijakan luar negeri Aljazair. Sebelum kemerdekaan Aljazair ini, Dewan Nasional Revolusi Aljazair (CNRA), organisasi tertinggi Front Pembebasan

Nasional (FLN) yang menyokong perang melawan Perancis, telah membentuk hubungan dekat dengan gerakan pembebasan Afrika dan memutuskan untuk mengkonsolidasikan hubungan dengan negara-negara Afrika yang baru merdeka dan juga dengan gerakan pembebasan negara-negara Afrika lainnya yang masih terjajah. Selama perang kemerdekaan melawan Prancis, revolusioner Aljazair berpartisipasi dalam semua pertemuan antar negara-negara Afrika.

Mereka mengadakan solidaritas keamanan dengan negara-negara Afrika yang merdeka dan dukungan nyata dari gerakan pembebasan berjuang untuk kemerdekaan penuh. Aljazair berjuang sendiri dalam meraih kemerdekaan sehingga menjadi inspirasi bagi gerakan pembebasan dibelahan negara lain.¹⁸ Tripoli menyatakan bahwa tujuan kebijakan luar negeri Aljazair akan "terpadu" dan berdasarkan,

"solidaritas penuh dalam perjuangan melawan imperialisme ... dukungan untuk gerakan pembebasan nasional ... pembesaran gerakan perjuangan dan penguatan garis depan untuk persatuan."¹⁹

Piagam nasional²⁰ dibuat untuk dapat mengalahkan neokolonialisme dan imperialisme, Aljazair akan mengobarkan,

"Sebuah aksi tak kenal lelah yang berjuang untuk tatanan ekonomi dunia baru dan untuk sistem hubungan internasional yang akan menjamin hak semua negara memiliki suara dalam penyelesaian masalahnya."²¹

¹⁸ Slimane Chikh, "L'Algérie et l'Afrique: 1954–1962," *Revue Algérienne des Sciences juridiques, politiques et économiques*, 3 (1968):703–46.

¹⁹ *Projet de Programme pour la réalisation de la révolution démocratique populaire (adoptée à l'unanimité par le CNRA à Tripoli en Juin 1962)*, available at:<http://www.elmouradia.dz/francais/symbole/textes/symbolefr.htm>, accessed 16 November 2009.

²⁰ *Democratic and Popular Algerian Republic. National Charter* (Algiers: Ministry of Culture and Information, 1981).

Untuk masyarakat Aljazair, politik pembebasan tidaklah cukup mereka juga harus berjuang untuk pembebasan ekonomi.²² Pada gilirannya, diperlukan "kedaulatan lengkap dan tidak terbatas atas sumber daya alam"²³ melalui nasionalisasi secara umum dan nasionalisasi sarana untuk pengembangan sumber daya alam. Hal ini jelas akan menyebabkan "persaingan dalam menguasai harga pasar," tapi semua inisiatif ini tidak mungkin tanpa adanya "solidaritas di seluruh dunia dari tindakan semua negara yang dieksploitasi."²⁴

Pembebasan Afrika menjadi kebijakan yang sangat direspon positif oleh negara-negara Afrika dalam tindakan diplomatik Aljazair untuk memungkinkan memainkan peran aktif di panggung internasional.²⁵ Aljazair menawarkan keuangan, politik dan dukungan militer untuk berbagai gerakan pembebasan di Afrika dan mempunyai peran penting dalam OAU. Kebijakan luar negeri Aljazair tidak diragukan lagi karena menjadi sangat penting bagi Afrika dalam mengejar beberapa tujuan kebijakan luar negeri dan perannya sebagai pendukung, pengembang dan penengah pembebasan negara.

Aljazair berbatasan dengan apa yang disebut zona "abu-abu". Karena Aljazair memiliki negara-negara yang bermasalah seperti di Libya, Tunisia, Mali dan khususnya Sahara Barat. Geopolitik Aljazair bisa dijelaskan pada berbagai tingkatan

²¹ National Charter of Aljazair, page: 97.

²² Ibid., page: 98.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid

²⁵ Slimane Chikh, "La politique africaine de l'Algérie," in Hubert Michel and Maurice Flory (eds), *Annuaire de l'Afrique du Nord*, Vol. 17 (Paris : CNRS/CRESM, 1979):3. This article is one of the most thorough on Algeria's relations with Africa.

analisis. Aljazair bisa digambarkan dalam konteks sebagai wilayah Maghribian, sebagai bagian dari wilayah Mediterania, atau sebagai wilayah Arab dan Afrika. Aljazair memiliki pengalaman besar dalam mengelola urusan internasional dan memiliki ahli terkemuka di Kementerian Luar Negeri kami, misalnya Mr. Ramtane Lamamra.

Keputusan luar negeri Aljazair adalah dinamis. Juga, ada interaksi yang luas dengan negara-negara lain, memiliki banyak hubungan bahkan dengan kekuatan barat. Ada keseimbangan dan interaksi antara semua kekuatan. Berbicara tentang kekuatan barat, Aljazair memiliki hubungan khusus dengan Perancis karena merupakan bekas koloni Perancis. Ini telah menjadikan perekonomian semakin mudah terhubung ke Eropa. Aljazair memiliki pengalaman besar dalam mengelola urusan internasional. Aljazair berjuang untuk banyak masalah geopolitik yang dianggap benar dan adil didalam konteks non-kolonisasi.’’²⁶

D. OAU: Sebuah Pangung Kebijakan Luar Negeri Aljazair

Dalam perannya sebagai pendukung pembebasan, Aljazair berperan penting dalam keputusan OAU untuk mengakui Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) sebagai anggota sepenuhnya yang ke 51 di organisasi. Rencana awal diprakarsai oleh Aljazair untuk menggabungkan dialog Arab-Afrika menjadi strategi global bagi negara-negara anggota agar bisa mengendalikan sumber daya mereka.

²⁶Djella Smaine. professor, permanent researcher in CRASC, Algeria.
<http://katehon.com/article/geopolitics-algeria>

Tidak diragukan lagi, Aljazair telah secara signifikan membuat banyak bentuk keputusan OAU dalam ekonomi dan politik. Aljazair mengerahkan beberapa diplomat terbaiknya untuk memperkuat OAU dan membangun hubungan bilateral yang solid antara negara-negara Afrika dan gerakan pembebasan. Aktivisme Aljazair dalam OAU mempromosikan ide dan untuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota terbukti relatif berhasil.

Kurang dari tiga bulan setelah Abdelaziz Bouteflika diangkat menjadi presiden, Aljazair menjadi tuan rumah KTT OAU yang ke-35, yang mana kehadiran Aljazair menjadi mengesankan.²⁷ Tuan rumah KTT itu tidak hanya menjadi awal untuk serangan diplomatik yang menegaskan kembalinya Aljazair didalam perannya di konferensi Afrika terkemuka, tetapi juga untuk melawan aspirasi Mesir, Libya dan Maroko.

Polisario telah mendapatkan pengakuan formal untuk SADR dari 81 negara, dan telah diperpanjang keanggotaannya dalam Uni Afrika. Sementara Maroko telah memenangkan pengakuan atau dukungan untuk posisinya dari beberapa pemerintah Afrika dan dari sebagian besar Liga Arab. Dalam kedua kasus, pengakuan yang lebih dari dua dekade terakhir telah diperpanjang dan ditarik pengakuannya oleh negara yang bersangkutan sesuai dengan perubahan tren internasional.

²⁷ Forty-five (38 heads of state, one vice-president, and six prime-ministers) of the 53 OAU member states attended.

E. Perebutan Sumber Daya Mineral

Salah satu alasan mengapa Aljazair dan Polisario tidak mampu meyakinkan dunia internasional untuk bertindak tegas yaitu berkaitan dengan sumber daya mineral yang dapat ditemukan di Sahara Barat. Sementara hukum internasional menjunjung tinggi hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri, terutama setelah bangkitnya pemerintahan kolonial seperti Spanyol, bisnis internasional jauh lebih ketat. Perusahaan ekstraksi tertarik pada bahan tambang fosfat (wilayah ekspor utama) atau minyak mentah, dan telah berulang kali ditegaskan oleh Maroko selama tiga dekade bahwa kepemilikan Sahara Barat sah secara *de facto*. Pada tahun 2001 dua perusahaan minyak – satu bermarkaskan di Paris dan yang lainnya di Houston - menandatangani kontrak penambangan minyak di Barat pantai Sahara. Kontrak ini ditandatangani oleh pemerintah Maroko tetapi dengan cepat diabaikan oleh otoritas SADR (Republik Demokratik Arab Sahara atau Sahrawi).²⁸

Aljazair dalam kaitannya dengan sumber daya alam milik Sahara Barat ini pun mempunyai kepentingan yang cukup membuat mereka bertahan dalam persaingan di wilayah sengketa ini. Seperti yang terjadi pada kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat di Sahara Barat, Aljazair juga mempunyai peran dan tujuan akhir yang besar untuk wilayah ini. Adanya kandungan sumber daya alam dan gas di Sahara Barat membuat Aljazair bersikeras dari puluhan tahun lamanya secara

²⁸ The Economist "Polisario's Sinking Hopes: Promises, promises, never kept." 361: 8251. (Dec. 8, 2001)

perlahan mengambil hati rakyat Sahrawi, Front Polisario serta para pengungsi lainnya di Tindouf untuk menguasai daerah tersebut meskipun dengan berbagai alasan mengatakan bahwa terdapat hak asasi manusia dalam konflik berkepanjangan ini.

Selain karena minyak dan gas yang berlimpah, di Sahara Barat juga mempunyai kawasan teritorial laut yang menjadi sumber pencarian ikan bagi nelayan, dan di Samudera Atlantik ini menghubungkan langsung Afrika bagian Utara dengan Eropa. Sehingga akses menjadi lebih mudah dan cepat. Dan dapat membuat hubungan bilateral dengan bangsa Eropa dengan lebih signifikan dan intens dengan lebih baik lagi, baik dari segi ekonomi maupun sosial pertukaran budaya dan politik damainya.

Selain kandungan fosfat dan perairan yang kaya akan ikan, Sahara Barat juga memiliki beberapa sumber daya alam tetapi tidak memiliki curah hujan yang cukup untuk sebagian besar kegiatan pertanian. Sahara Barat juga mempunyai ladang minyak yang kaya dan gas alam lepas pantai. Sebagian besar makanan untuk penduduk perkotaan diimpor. Semua perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya dikendalikan oleh pemerintah Maroko. Pemerintah Maroko telah mendorong warga untuk pindah ke wilayah Sahara dengan memberikan subsidi dan kontrol harga pada barang-barang pokok. Subsidi yang berat ini telah menciptakan dominasi ekonomi negara di bagian Maroko yang dikendalikan dari Sahara Barat, dengan pemerintah Maroko sebagai kekuatan utama tunggal terbesar.

Fosfat termasuk dalam sumber daya alam yang tidak terbatas, tidak semua wilayah didunia ini memiliki cadangan kekayaan berupa fosfat. Selain itu fosfat juga salah satu komponen penting dalam dalam industri pertanian modern. Berkembangnya teknologi didunia menjadikan harga fosfat semakin meningkat. Para akademisi dari Sahara Barat menggambarkan bahwa cadangan fosfat di Bukra memiliki kualitas yang tinggi karena dekat dengan permukaan. Mereka juga mengatakan bahwa harga yang dikenakan Maroko untuk fosfat tidak sebanding dengan beban yang dialami oleh pekerjaannya.²⁹

Secara teoritis, Aljazair dan negara-negara lain yang terlibat dalam kepentingan di Sahara berpotensi mendapatkan manfaat dari kemerdekaan Sahara Barat karena kuatnya posisi pasar dalam produksi fosfat di Sahara Barat yang kemudian menjadi hak Maroko dalam mengendalikan ekspor fosfat. Kuatnya posisi pasar ini akan menguasai 85% dari 22 cadangan fosfat dunia.

Meskipun Angkatan Bersenjata Kerajaan Maroko mampu menetralkan (menghambat) Polisario diawal perjuangan lima belas tahunnya, belum ada kemenangan Maroko yang dapat membenarkan klaim *teritorial* Maroko ini. Persetujuan tanpa protes dari kalangan internasional terhadap klaim Maroko akan dirasakan Aljazair sebagai dorongan *iredentisme*³⁰ oleh Maroko, dan akan memperburuk integrasi diantara kawasan maghribi, maupun kedua negara. Saat ini seluruh generasi orang-orang Sahrawi telah tumbuh di kamp-kamp pengungsi yaitu di

²⁹ <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub1152.pdf> hal 21

³⁰ (Dari bahasa Italia *irredento*, "penebusan"), adalah konsep politik di mana suatu negara berhasrat untuk menganeksasi wilayah yang dikuasai oleh negara lain atas dasar persamaan etnis, keterkaitan sejarah dan budaya, baik aktual maupun hanya dugaan.

Tindouf. Tanpa resolusi dari persengketaan Sahara Barat, maka Maroko dan Aljazair akan tetap menjadi musuh, bukan sekutu, dan orang-orang Sahrawi akan terus menjadi orang-orang yang menderita.

Sebab lain dalam faktor politik penyebab konflik ini adalah karena adanya *geopolitic leverage* yang menjadi takdir antar negara Maroko dengan Sahara Barat yang mana mencakup juga dari geopolitik Aljazair. Aljazair yang menjadi kekuatan utama di negeri maghribi bahkan salah satu yang terbesar di Afrika ini menjadikan mereka mempunyai keunggulan yang disegani negeri-negeri lain. Khususnya daerah utara Afrika dan sepanjang perbatasan Sahel.

Karena pengaruh politik dan HAM nya cukup kuat, seharusnya Aljazair juga mampu mengatasi permasalahan geopolitikal di kawasan terdekatnya, khususnya pada permasalahan Sahara Barat yang berkonflik dengan Maroko. Tetapi ternyata Aljazair juga masih menimbang asa-asa HAM internasional yang membuat mereka tidak bisa semena-mena dalam penentuan hak dan *historical* Sahara Barat. Hal ini menjadikan masalah ini berlarut-larut dan menjadi persaingan seru diantara Maroko dan Aljazair di zona politik maupun ekonomi. Tidak hanya di zona regional bilateral, tetapi juga keranah Konferensi Tinggi Tingkat Afrika, yang membuat kedua pihak selalu mengaitkan beberapa permasalahan ke titik Sahara Barat.

Dapat diketahui juga dari data diatas bahwa Aljazair mempunyai kepentingan di Sahara Barat yang mana Maroko adalah musuh abadi dan aktor penolak utama dalam hubungan Aljazair dengan Sahara Barat. Walaupun tidak bisa ditampik bahwa

kedua negara mempunyai hubungan ekonomi yang cukup baik, tetapi Aljazair sebagai salah satu negara pendukung utama kebebasan Sahara tidak akan pernah bisa akur dengan isu-isu mengenai perpetaan Sahara Barat. Dalam perjalanannya hingga dewasa ini, 2010-2013, mereka cukup stabil dalam kondisi perekonomian dengan ekspor dan impor yang sama-sama kuat. Hal ini menjadi pertimbangan ketika mereka mengadakan konsolidasi damai untuk kemerdekaan Sahara Barat.

Hingga awal tahun 2014, Aljazair telah menjadi pelindung bagi Polisario yang mampu mencapai keuntungan kecil dan keuntungan yang melemahkan saingannya yaitu Maroko. Ketika kasus *Western Sahara* belum diselesaikan, Aljazair masih akan dipandang sebagai hambatan menuju perdamaian karena menjadi sebuah persaingan dengan Maroko, tetapi Aljazair akan terus melihat dirinya sebagai pembela hak-hak penentuan nasib sendiri (kemerdekaan bangsa lain), dan menggunakan keyakinan ini sebagai sarana untuk lebih melemahkan Maroko baik di Mahgreb maupun panggung global.